SIGUNTANG feunpal.id/journal/
Volume 3, No. 1, April 2025

ANALISIS DAMPAK SOSIAL PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI) BERBASIS SOCIAL IMPACT ASSESMENT (SIA): STUDI KASUS DESA KARYA MUKTI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Dolly Tanzil[1]
Universitas Sriwijaya[1]
dollytanzil@fe.unsri.ac.id[1]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak sosial pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh PT. Sumber Hijau Permai (SHP) di sekitar wilayah Desa Karya Mukti, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan menggunakan pendekatan Social Impact Assessment (SIA) berbasis kualitatif, studi ini menggali perubahan dalam aspek sosial, ekonomi, ekologi, dan budaya masyarakat, serta merumuskan strategi mitigasi yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan observasi partisipatif. Analisis data dilakukan secara tematik menggunakan pendekatan Miles dan Huberman, yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil menunjukkan bahwa pembangunan HTI membawa dampak ganda positif dalam pembukaan akses kerja dan infrastruktur, namun negatif dalam penurunan akses terhadap sumber daya alam, ketimpangan pendapatan, dan kerentanan sosial. Rekomendasi diarahkan pada penguatan kemitraan, transparansi CSR, dan pembangunan sosial berbasis nilai-nilai Islam.

Kata kunci: *Dampak sosial, Ekonomi islam, HTI, Social impact asessment*

PENDAHULUAN

Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) telah menjadi strategi utama pemerintah dalam penyediaan bahan baku industri kehutanan. Di Indonesia, HTI berkembang pesat sejak 1980-an dan kini mencakup lebih dari 10 juta hektare lahan (FWI, 2015; BPS, 2023). Salah satu perusahaan yang aktif dalam pengembangan HTI adalah PT. Sumber Hijau Permai (SHP), bagian dari Sinar Mas Forestry, yang beroperasi di Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan.

Desa Karya Mukti merupakan salah satu desa yang terdampak langsung oleh kegiatan HTI tersebut. Masyarakatnya yang mayoritas menggantungkan hidup pada pertanian, perkebunan rakyat, dan hasil hutan non-kayu kini menghadapi perubahan signifikan dalam pola kehidupan akibat perubahan tata guna lahan dan akses terhadap sumber daya.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kehadiran HTI membawa dampak ekonomi positif, namun juga menciptakan konflik sosial dan degradasi lingkungan (Syafaruddin et al., 2014; Heriyanto et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan instrumen penilaian dampak sosial yang sistematis seperti *Social Impact Assessment* (SIA) untuk mengelola risiko sosial dan membangun strategi mitigasi yang adil.

Dalam konteks ekonomi Islam, keadilan sosial (*al-'adl*), perlindungan terhadap kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), dan larangan terhadap penindasan (*zulm*) menjadi prinsip penting dalam menilai keabsahan suatu pembangunan. QS. Al-Baqarah: 275 menyatakan: *"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*, yang relevan dengan

konteks pembiayaan masyarakat. Selain itu, QS. Al-Hujurat: 13 menekankan prinsip kesetaraan sosial, dan QS. Al-Anfal: 1 mendorong pentingnya rekonsiliasi dalam konflik sosial.

Berdasarkan kompleksitas dampak sosial yang ditimbulkan oleh pembangunan HTI baik dalam hal akses lahan, penghidupan, maupun ketimpangan sosial dan pentingnya menilai kondisi tersebut melalui pendekatan yang adil dan partisipatif, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dampak sosial pembangunan HTI oleh PT. SHP di Desa Karya Mukti dengan pendekatan *Social Impact Assessment* (SIA), serta menganalisisnya dalam perspektif ekonomi Islam guna merumuskan strategi pembangunan yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan bermaslahat bagi masyarakat.

Penelitian terdahulu

Penelitian oleh Youlla et al. (2020) dalam jurnal *Ziraa'ah* menelaah dampak sosial HTI PT. Muara Sungai Landak di Dusun Nanas, Kalimantan Barat. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan HTI membawa manfaat berupa pembangunan infrastruktur dan bantuan fasilitas umum. Namun, masyarakat masih mengalami tekanan sosial akibat perubahan tata guna lahan dan ketergantungan terhadap perusahaan. Penelitian ini menyoroti perlunya penguatan relasi sosial dan ekonomi agar manfaat HTI merata.

Sementara itu, Wahdaniah et al. (2022) melalui studi di Gorontalo menunjukkan bahwa HTI berdampak pada perubahan tutupan lahan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan menggunakan analisis NDVI dan survei sosial, hasil menunjukkan bahwa HTI meningkatkan pendapatan masyarakat, namun juga menyebabkan konversi lahan besar-besaran yang mengubah ekosistem dan pola mata pencaharian lokal.

Penelitian Syafaruddin et al. (2014) fokus pada kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Radak II akibat HTI PT. Wana Subur Lestari. Studi ini menemukan bahwa HTI berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan serapan tenaga kerja, tanpa menunjukkan dampak negatif pada kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya potensi positif pembangunan HTI bila dirancang dengan pendekatan pemberdayaan yang berkeadilan.

Berbeda dengan temuan-temuan di atas, Wirdani et al. (2023) menyoroti konflik agraria yang terjadi antara masyarakat Desa Kota Garo dan PT. Arara Abadi. Studi ini memetakan fase konflik dan mengungkap dampak sosial negatif seperti perpecahan antarwarga, kerusakan sosial, serta kehilangan rasa aman. Hal ini memperlihatkan bahwa minimnya musyawarah dan kejelasan hak atas tanah dapat memperparah dampak sosial HTI.

Terakhir, Deli et al. (2019) meneliti persepsi masyarakat terhadap HTI PT. Finnantara Intiga di Desa Terati, Kalimantan Barat. Sebagian besar masyarakat memiliki persepsi netral hingga negatif terhadap perusahaan, dengan alasan minimnya manfaat langsung, rendahnya partisipasi masyarakat, dan ketidakjelasan program CSR. Temuan ini memperkuat perlunya pendekatan partisipatif dan transparansi dalam pengelolaan HTI.

Tinjauan pustaka

Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Dampak Sosial

HTI merupakan sistem pengelolaan hutan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri kehutanan berbasis tanaman cepat tumbuh seperti *Acacia* dan *Eucalyptus*. Program ini diperkuat melalui berbagai regulasi nasional sejak akhir 1980-an. Menurut Forest Watch Indonesia (2015), lebih dari 10 juta hektare lahan telah digunakan untuk HTI, namun tidak sedikit yang tumpang tindih dengan lahan masyarakat adat dan petani kecil.

Beberapa studi menunjukkan HTI dapat membuka lapangan kerja dan mendorong infrastruktur (Syafaruddin et al., 2014), tetapi juga menimbulkan eksklusi sosial, konflik tenurial, dan kerusakan lingkungan (Heriyanto et al., 2022; Wahdaniah et al., 2022). Dampak

sosial ini meliputi perubahan struktur penghidupan, ketimpangan distribusi manfaat, dan gangguan terhadap kohesi sosial.

Social Impact Assessment (SIA)

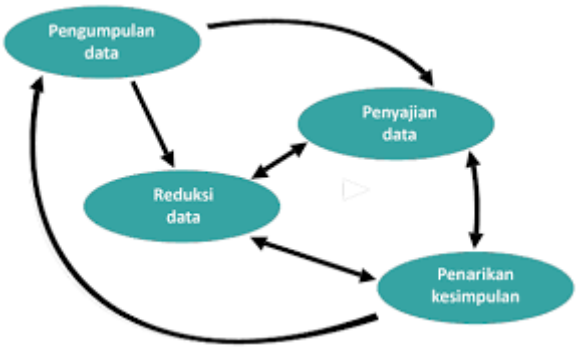
SIA merupakan pendekatan sistematik untuk menilai dampak sosial dari intervensi pembangunan yang direncanakan (Vanclay, 2003). Komponen SIA meliputi identifikasi aktor terdampak, persepsi masyarakat, jalur dampak (transmission channels), dan rancangan mitigasi. Prinsip utama SIA adalah partisipasi dan keadilan sosial, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi subjek yang berdaulat atas kehidupannya.

Ekonomi Islam dan Prinsip Keadilan Sosial

Ekonomi Islam tidak hanya membahas efisiensi, tetapi menekankan keadilan distribusi, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Konsep *maslahah* (kemanfaatan umum) menjadi dasar dalam menilai kebijakan. Praktik monopoli akses lahan atau riba dalam pembiayaan dilarang dalam Islam karena menciptakan ketimpangan struktural. Ayat-ayat yang sering dikutip dalam kajian sosial antara lain: QS. Al-Baqarah: 275 – larangan riba, QS. Al-Hujurat: 13 – keadilan dan kesetaraan sosial, QS. Al-Anfal: 1 – musyawarah dan persaudaraan sosial

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus di Desa Karya Mukti, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, yang secara geografis berada di sekitar wilayah operasional PT. Sumber Hijau Permai (SHP). Data dikumpulkan melalui berbagai teknik, yaitu wawancara mendalam kepada tokoh masyarakat, petani, perempuan, pemuda, serta aparat desa; diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan warga setempat untuk menggali persepsi dan strategi mitigasi; serta observasi partisipatif untuk melihat kondisi sosial dan ekologis secara langsung. Responden penelitian dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap dampak pembangunan HTI, dengan jumlah partisipan sekitar 20 orang dari berbagai kelompok sosial. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data lapangan; penyajian data, berupa pengorganisasian informasi secara sistematis agar dapat ditarik makna; dan penarikan kesimpulan/verifikasi, yang merupakan proses mencari pola, tema, serta hubungan antar data yang kemudian diverifikasi secara terus-menerus (Sugiyono, 2015). Analisis dilakukan secara tematik dengan mengaitkan temuan lapangan terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, seperti maslahah, keadilan distribusi, dan larangan eksploitasi.



Gambar 1. Komponen dalam analisis data

SIGUNTANG feunpal.id/journal/
Volume 3, No. 1, April 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak sosial pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Desa Karya Mukti tercermin dari perubahan yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dari sisi aset alam, masyarakat mengalami hilangnya akses terhadap hasil hutan non-kayu yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan utama, disertai dengan penurunan kualitas air dan terjadinya degradasi lahan. Dalam aspek sumber daya manusia, tingkat pendidikan yang masih rendah dan keterbatasan keterampilan menyebabkan sebagian besar warga hanya mampu mengakses pekerjaan sebagai buruh kasar dengan upah tidak menentu. Sementara itu, pada modal sosial, nilai-nilai kebersamaan seperti tradisi gotong royong mulai melemah, ditambah munculnya kecemburuan sosial akibat distribusi bantuan yang tidak merata.

Pada aspek modal keuangan, penghasilan harian masyarakat cenderung tidak stabil, dan sekitar 60% dari mereka mengandalkan pinjaman berbunga tinggi, yang justru memperparah kerentanan ekonomi. Dari sisi infrastruktur, kondisi jalan yang rusak, pasar desa yang belum aktif, serta irigasi yang tidak memadai semakin memperkuat ketimpangan dan hambatan dalam aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Seluruh kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan HTI telah memicu tantangan serius terhadap keberlanjutan sosial dan kesejahteraan lokal.

Tabel 1. Perubahan Lima Aset Kehidupan Masyarakat Desa Karya Mukti

Periode	SDA (Sumber Daya Alam)	SDM (Manusia)	Keuangan	Infrastruktur	Sosial
2010–2015	Akses hutan menurun	Pendidikan dasar meningkat	Kredit informal tumbuh	Jalan desa mulai dibangun	Gotong royong masih kuat
2015–2020	Degradasi lahan meningkat	Lulusan SMP/SMA bertambah	Bantuan tunai dan pinjaman informal meningkat	Fasilitas CSR hadir, belum merata	Kelembagaan mulai aktif
2020–2025	Konflik sumber daya meningkat	Pelatihan yang diberikan belum disesuaikan kebutuhan pasar kerja.	Ketergantungan pada rentenir tinggi	Jalan dan irigasi rusak sebagian	Kohesi sosial melemah, kecemburuan

Sumber : Data hasil wawancara tahun 2025

Tabel 2. Dampak Sosial Kehadiran HTI di Desa Karya Mukti

Aspek	Dampak yang Terjadi	Keterangan
Ekologis	Perubahan tutupan lahan, penurunan kualitas air, degradasi rawa gambut	Gangguan keseimbangan ekosistem dan mata pencaharian lokal
Ekonomi	Lapangan kerja kontrak meningkat, tetapi penghasilan tidak stabil	Ketergantungan pada perusahaan tinggi; ketidakpastian ekonomi
Sosial	Konflik lahan, kehilangan akses, ketegangan antar kelompok	Terutama dirasakan oleh petani, perempuan, dan pemuda

Aspek	Dampak yang Terjadi	Keterangan
Kelembagaan	Rendahnya partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan	Musyawarah kurang; dominasi eksternal dalam tata kelola sumber daya desa
Sosial Budaya	Perubahan gaya hidup konsumtif, menurunnya ketahanan pangan lokal, bergesernya nilai gotong royong	Transformasi sosial cenderung negatif tanpa disertai pemberdayaan yang memadai

Sumber : Data hasil wawancara tahun 2025

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa pembangunan HTI oleh PT. Sumber Hijau Permai (SHP) di Desa Karya Mukti memberikan dampak sosial-ekologis yang kompleks. Di satu sisi terdapat manfaat seperti terbukanya akses lapangan kerja dan fasilitas infrastruktur, namun di sisi lain terjadi penurunan akses terhadap hasil hutan non-kayu, ketimpangan sosial, serta kerusakan ekosistem lokal.

Temuan ini sejalan dengan studi Wahdaniah et al. (2022) di Gorontalo yang menemukan bahwa HTI meningkatkan pendapatan namun berdampak pada konversi lahan skala besar dan perubahan ekosistem. Demikian pula, Youlla et al. (2020) mencatat adanya ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan dan tekanan sosial yang serupa terjadi di Desa Karya Mukti. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Syafaruddin et al. (2014) yang menunjukkan dampak positif HTI terhadap kesejahteraan tanpa menimbulkan masalah kesehatan atau sosial. Ketidaksesuaian ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan pola pengelolaan perusahaan, konteks geografis, atau tingkat partisipasi masyarakat yang lebih rendah dalam kasus Desa Karya Mukti.

Secara lebih kritis, hasil penelitian ini memperkuat temuan Wirdani et al. (2023) yang menggarisbawahi konflik agraria dan keretakan sosial akibat HTI. Minimnya musyawarah dan dominasi perusahaan terhadap tata kelola lahan tampak konsisten dalam kedua studi ini. Maka, aspek partisipasi, keadilan distribusi, dan perlindungan sumber daya menjadi isu sentral yang harus disoroti.



Gambar 2. Kegiatan Wawancara dan FGD di Desa Karya Mukti

Relevansi terhadap Prinsip Ekonomi Islam

1. Larangan Riba dan Eksploitasi Finansial

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

Mayoritas warga Desa Karya Mukti terpaksa menggunakan pinjaman informal dengan bunga tinggi akibat minimnya akses pembiayaan yang adil. Kondisi ini menciptakan beban ekonomi dan memperparah kerentanan sosial. Dalam ekonomi Islam, sistem keuangan seharusnya mendukung produktivitas dan kesejahteraan melalui skema bebas riba seperti qard hasan, mudharabah, atau koperasi syariah.

2. Keadilan Distribusi dan Anti Monopoli

"...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (QS. Al-Hasyr: 7)

HTI telah memonopoli sebagian besar lahan yang sebelumnya dikelola masyarakat secara kolektif. Akses terhadap sumber daya menjadi tidak setara. Prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan tasharruf bi al-'adl (distribusi aset secara adil) menuntut agar pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi harus menyebarkan manfaat kepada seluruh elemen masyarakat.

3. Partisipasi dan Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu…" (QS. Asy-Syura: 38)

Proses pembangunan HTI oleh PT. SHP selama ini minim pelibatan masyarakat dalam perencanaan maupun evaluasi. Ini bertentangan dengan prinsip syura (musyawarah) dalam Islam yang mewajibkan pelibatan semua pihak dalam keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Partisipasi publik merupakan bentuk pengakuan terhadap martabat dan hak warga.

4. Larangan atas Kerusakan Lingkungan dan Ketimpangan Sosial

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah tangan manusia…" (QS. Ar-Rum: 41)

"Janganlah kamu merusak di muka bumi setelah diperbaiki…" (QS. Al-A'raf: 85)

Kehadiran HTI berdampak pada degradasi lingkungan, seperti berkurangnya kualitas air, terganggunya ekosistem rawa gambut, dan berkurangnya hasil pertanian. Dalam Islam, manusia sebagai khalifah wajib menjaga keseimbangan (mīzān) dan keberlanjutan ciptaan Allah. Setiap bentuk pembangunan yang mengakibatkan fasād (kerusakan) merupakan pelanggaran terhadap mandat ini.

5. Kemaslahatan Umum dan Perlindungan Kaum Rentan

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." (QS. Al-Ma'idah: 2)

Ekonomi Islam menuntut pembangunan yang menghasilkan manfaat kolektif (maslahah 'ammah), terutama bagi kelompok yang lemah: petani kecil, perempuan, dan masyarakat miskin. Bila sebuah program pembangunan justru memperlebar kesenjangan atau menciptakan ketimpangan struktural, maka perlu dikaji ulang secara mendasar.

KESIMPULAN

Pembangunan HTI oleh PT. SHP di Desa Karya Mukti memberikan dampak sosial yang luas, baik dari sisi ekonomi, ekologi, maupun kohesi sosial masyarakat. Pendekatan *Social Impact Assessment* memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat belum optimal, distribusi manfaat belum adil, dan potensi konflik sosial masih tinggi. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini menunjukkan penyimpangan dari prinsip keadilan dan amanah yang seharusnya menjadi dasar pembangunan. Berdasarkan hasil analisis, disarankan agar pembangunan Hutan

Tanaman Industri (HTI) oleh PT. Sumber Hijau Permai (SHP) di Desa Karya Mukti diarahkan untuk lebih memperhatikan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan. Perusahaan perlu menjalin kemitraan produktif berbasis syariah dengan masyarakat, seperti skema bagi hasil dan kerja sama usaha berbasis nilai tolong-menolong dan keadilan. Selain itu, pembentukan koperasi syariah desa penting dilakukan guna menyediakan akses pembiayaan yang bebas riba dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Upaya restorasi lahan sebaiknya dilakukan secara partisipatif, misalnya melalui pengembangan agroforestry yang melibatkan petani lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) perlu dijalankan secara transparan dan terbuka, dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah pada setiap tahap pelaksanaan. Untuk memperkuat keberlanjutan program, revitalisasi kelembagaan lokal seperti masjid, kelompok tani, dan karang taruna harus diperkuat sebagai pilar utama pemberdayaan masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Kehutanan Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Burdge, R. J., & Vanclay, F. (1996). Social impact assessment: A contribution to the state of the art series. *Impact Assessment*, 14(1), 59–86. https://doi.org/10.1080/07349165.1996.9725886

Deli, Y., Ramadhan, D., & Sutrisno, T. (2019). Persepsi masyarakat terhadap HTI di Desa Terati. *Jurnal Sains Sosial dan Lingkungan*, 5(1), 12–20.

Forest Watch Indonesia. (2015). *Potret keadaan hutan Indonesia*. Bogor: Forest Watch Indonesia.

Heriyanto, H., Syahrial, M., & Yusriadi, Y. (2022). Dampak sosial HTI terhadap masyarakat lokal. *Jurnal Dinamisia*, 6(2), 88–96. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8675

Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafaruddin, A., Yusra, A. H. A., & Radian. (2014). Dampak ekonomi kehadiran HTI terhadap rumah tangga di Kalbar. *Jurnal Ziraa'ah*, 39(1), 23–32.

Vanclay, F. (2003). International principles for social impact assessment. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 21(1), 5–11. https://doi.org/10.3152/147154603781766491

Wahdaniah, W., Rahim, S., & Bempah, I. (2022). Kajian sosial ekonomi dan ekologis di HTI Gorontalo. *Jurnal Kehutanan Gorontalo*, 4(1), 61–70. https://doi.org/10.32662/jkg.v4i1.1836

Wirdani, F., Aziz, M. A., & Wulandari, D. (2023). Konflik agraria dan dampak sosial HTI di Kota Garo. *Jurnal Agraria dan Sosial*, 9(1), 44–55.

Youlla, A., Gunawan, B., & Setiawan, A. (2020). Dampak sosial HTI PT. Muara Sungai Landak. *Jurnal Ziraa'ah*, 45(2), 101–110.

Al-Qur'an:

Surah Al-Baqarah: 275

Surah Al-Hujurat: 13

Surah Al-Anfal: 1

Surah Al-Hasyr: 7

Surah Asy-Syura: 38

Surah Ar-Rum: 41

Surah Al-A'raf: 85

Surah Al-Ma'idah: 2